



TRANSFORMASI INDUSTRI SAWIT MENUJU KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING GLOBAL

Eka Budiyaniti*

Abstrak

Industri sawit merupakan sektor strategis yang menghadapi tekanan global terkait isu keberlanjutan, keterlacakan, dan deforestasi, terutama dengan diterapkannya European Union Deforestation Regulation (EUDR). Tantangan internal seperti rendahnya produktivitas kebun rakyat, ketidaksinkronan data, serta tumpang tindih regulasi menuntut adanya transformasi menyeluruh. Tulisan ini menyoroti urgensi transformasi sawit yang adaptif terhadap perkembangan global, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen penurunan emisi. Arah transformasi mencakup replanting, digitalisasi rantai pasok, hilirisasi produk bernilai tambah, serta penguatan standar keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dalam konteks ini, Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong harmonisasi regulasi lintas sektor, memperkuat kredibilitas ISPO agar diakui secara global, serta memperluas dukungan riset dan inovasi, termasuk pengembangan biofuel, oleokimia, dan biomaterial. Dengan penguatan peran legislasi dan pengawasan, industri sawit berpeluang menjadi model pembangunan hijau yang inklusif, berdaya saing global, dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi berkelanjutan nasional.

Pendahuluan

Industri sawit merupakan sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Produksi *crude palm oil* (CPO) menyumbang sekitar 3,5% produk domestik bruto (PDB). Industri sawit mengelola 16,8 juta hektare lahan di Indonesia, dengan menyerap lebih dari 16,5 juta tenaga kerja. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat total ekspor termasuk CPO dan turunannya mencapai lebih dari 25 juta ton, naik 13,4% dibandingkan tahun 2024. Nilai ekspor tersebut menghasilkan devisa sebesar US\$27,3 miliar, tumbuh 40% dibandingkan 2024 (Ddin, 2025).

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission 2060, industri kelapa sawit tidak lagi dipandang semata sebagai penopang ekonomi nasional. Sektor ini mulai dianggap sebagai contoh nyata transformasi berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Selain itu, industri sawit juga memainkan peran penting dalam memperkuat transisi Indonesia menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih (Alatas, 2025). Meski demikian, tuntutan global

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: eka.budiyaniti@dpr.go.id

terhadap praktik keberlanjutan, meningkatnya kebutuhan akan transparansi data, serta adanya tumpang tindih regulasi menjadikan sektor ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Tuntutan terkait isu lingkungan dan tata kelola mendorong perlunya perubahan mendasar, agar sawit tetap menjadi komoditas yang kompetitif dan berkelanjutan.

Tulisan ini memberikan gambaran urgensi transformasi industri sawit agar adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu juga ingin menunjukkan bagaimana transformasi tersebut sejalan, sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan upaya penurunan emisi.

Urgensi Transformasi Industri Sawit

Transformasi industri sawit menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan dan keterlacakan rantai pasok. Uni Eropa bersiap memberlakukan Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), sebuah kebijakan yang dirancang untuk menekan laju hilangnya hutan secara global. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang memasok, memperdagangkan, atau mengeksport sejumlah komoditas, termasuk minyak sawit ke pasar Eropa untuk mematuhi standar ketat terkait asal-usul produk. Melalui EUDR, rantai pasok harus dapat ditelusuri sepenuhnya dan pelaku usaha harus memberikan bukti bahwa komoditas yang mereka perdagangkan tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi setelah tanggal batas yang ditetapkan (Novena & Utama, 2025). Indonesia yang menguasai sekitar 59% pasar minyak sawit dunia (Ferdiansyah, 2025), harus memastikan bahwa produksi sawit memenuhi standar lingkungan dan sosial internasional.

Faktor internal juga turut memperkuat urgensi transformasi industri sawit. Sekitar 40% dari total lahan sawit dikelola oleh petani kecil. Jika dibandingkan dengan kebun milik perusahaan swasta maupun BUMN, hasil kebun rakyat masih tertinggal jauh. Rata-rata produksi CPO dari kebun swadaya hanya berkisar 3–4 ton per hektare per tahun. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi karena masih rendahnya keterampilan teknis dan manajerial para petani sawit swadaya (Rahadi, 2025). Selain itu, setiap instansi menggunakan basis data berbeda terkait luas lahan, produksi, maupun status legalitas perkebunan. Akibatnya, tidak tersedia satu sumber data resmi sebagai rujukan bersama, sehingga menyulitkan perencanaan kebijakan berbasis data (Firmansyah & Utomo, 2025). Ketidaksinkronan data berdampak langsung pada perencanaan peremajaan perkebunan rakyat (*replanting*), penegakan tata ruang, hingga pemetaan risiko emisi.

Sawit tidak hanya menjadi komoditas strategis, tetapi juga instrumen pembangunan jangka panjang yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan tekanan global atas isu deforestasi dan keterlacakan rantai pasok, transformasi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing di pasar internasional (Tsiwiyati, 2024). Oleh karena itu, agenda keberlanjutan dalam industri sawit tidak semata respons terhadap regulasi eksternal seperti EUDR, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk membangun ekonomi hijau yang inklusif dan resilien.

Transformasi Industri Sawit

Industri sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusi industri sawit terhadap devisa dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, menuntut industri ini beradaptasi terhadap regulasi global yang semakin ketat, terutama terkait isu deforestasi dan keterlacakan rantai pasok. Transformasi menjadi keharusan, bukan hanya untuk menjaga daya saing, tetapi juga untuk memastikan sawit tetap relevan dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang.

Transformasi industri sawit Indonesia menuntut langkah nyata yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu fokus transformasi adalah peningkatan produktivitas melalui *replanting* dengan bibit unggul, serta digitalisasi rantai pasok yang memungkinkan keterlacakan dari kebun hingga produk akhir. Digitalisasi rantai pasok menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tuntutan global terhadap keterlacakan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh disparitas kapasitas teknologi antara perusahaan besar dan petani swadaya. Tanpa intervensi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital dan edukasi teknis, digitalisasi berisiko memperlebar kesenjangan antarpelaku industri. Karena itu, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan standar teknologi dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, hilirisasi produk turunan seperti biofuel, *sustainable aviation fuel*, oleokimia, dan biomaterial menjadi strategi penting untuk memperbesar nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor CPO mentah. Selain itu, hilirisasi produk turunan juga sekaligus dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsiwiyati (2024), yang menunjukkan bahwa hilirisasi industri kelapa sawit tidak hanya meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan industri nasional terhadap hambatan perdagangan internasional, tetapi juga berkontribusi dalam mitigasi dampak lingkungan dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Selain itu, penguatan regulasi dan inovasi dalam produksi berkelanjutan menjadi kunci utama agar industri kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif secara global.

Hilirisasi juga membutuhkan ekosistem industri yang kuat, termasuk insentif fiskal, infrastruktur logistik, dan pasar yang stabil untuk produk turunan seperti biofuel atau biomaterial. Hambatan struktural seperti keterbatasan kapasitas industri, ketidakpastian

regulasi, dan fluktuasi harga minyak mentah global dapat memengaruhi keberlanjutan investasi hilir. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa konsistensi kebijakan industri dan energi nasional.

Transformasi sawit juga menekankan penguatan tata kelola dan standar keberlanjutan melalui sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang kredibel, serta harmonisasi regulasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sertifikasi ISPO memang menjadi instrumen nasional, tetapi keterbatasan pengakuan internasional menunjukkan adanya kesenjangan kredibilitas. Indonesia perlu membangun mekanisme sertifikasi yang sesuai dengan standar global, sekaligus memperkuat transparansi data agar ISPO tidak dipersepsikan sebagai instrumen proteksionis.

Pada akhirnya, transformasi sawit adalah agenda besar yang menuntut kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Transformasi sawit bukan hanya tentang menjaga daya saing, tetapi juga tentang memastikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam komoditas strategis. Tanpa langkah cepat dan konsisten, Indonesia berisiko kehilangan momentum dan posisi sebagai penguasa pasar sawit dunia. Namun, dengan komitmen yang kuat, regulasi yang harmonis, dan inovasi yang inklusif, industri sawit dapat menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkeadilan.

Penutup

Transformasi industri sawit merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga daya saing, keberlanjutan, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dalam hal ini, Komisi VII DPR RI berperan penting mendorong sinkronisasi regulasi lintas sektor, memperkuat kredibilitas ISPO agar diakui secara global, serta mendukung riset dan hilirisasi biofuel, oleokimia, dan biomaterial.

Selain itu, dukungan Komisi VII DPR RI juga menjadi kunci dalam memastikan transformasi industri sawit berjalan secara konsisten dan terukur. Komisi VII perlu mendorong integrasi data perkebunan nasional melalui sistem informasi yang terpusat, serta memastikan implementasi standar keberlanjutan berjalan efektif di seluruh rantai pasok. Penguatan koordinasi antarkementerian juga perlu dipercepat agar kebijakan hulu-hilir lebih sinkron sehingga industri sawit tidak hanya mampu memenuhi tuntutan global, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, industri sawit Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

Referensi

- Alatas, M. B. I. (2025, November 27). Kepala Bappenas: Industri sawit jadi contoh transformasi berkelanjutan. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5270281/kepala-bappenas-industri-sawit-jadi-contoh-transformasi-berkelanjutan>
- BPD P. (2025, November 24). Mewujudkan industri sawit hijau melalui strategi hilirisasi. *BPD P* <https://www.bpd p.or.id/mewujudkan-industri-sawit-hijau-melalui-strategi-hilirisasi>
- Ddin, A. (2025, November 16). Ekspor minyak sawit indonesia tembus 25 juta ton, naik 13,4 persen tahun ini. *Haisawit.co.id*. <https://haisawit.co.id/news/detail/ekspor-minyak-sawit-indonesia-tembus-25-juta-ton-naik-134-persen-tahun-ini>
- Firmansyah, M. & Utomo, Y. W. (2025, November 14). Fragmentasi regulasi hambat keberlanjutan industri sawit RI. *Lestari.kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2025/11/14/115100286/fragmentasi-regulasi-hambat-keberlanjutan-industri-sawit-ri>
- Novena, M. & Utama, Y. W. (2025, November 23). Uni Eropa tunda setahun penerapan regulasi deforestasi EUDR. *Kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2025/11/23/110000986/uni-eropa-tunda-setahun-penerapan-regulasi-deforestasi-eudr>
- Rahadi, F. (2025, September 12). Produktivitas sawit rakyat masih rendah, bpd p dan ditjenbun targetkan 10.786 petani naik kelas. *Rejogja.republika.co.id*. <https://rejogja.republika.co.id/berita/t2gqhr291/produktivitas-sawit-rakyat-masih-rendah-bpd p-dan-ditjenbun-targetkan-10786-petani-naik-kelas>
- Tsiwiyati, D. N. (2024). Transformasi industri kelapa sawit: Hilirisasi berkelanjutan menghadapi daya saing global dan ekonomi hijau. *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 6 No. 2 Desember, 27–45.

